

ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Yanendra

Alumni UPN Veteran Yogyakarta; e-mail : iyan_cteru@yahoo.co.id

Abstract

This examination have aim to know potention of market retribution, potention of market retribution, efficiency, effectiveness, contribution of retribution market for regional retribution and contribution of retribution for PAD. Data used secondary data that realisation of absorbtion and publication, valuation and receive realisation market retribution and the money collected cost market retribution for Dinas Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Yogyakarta, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, and Biro Pusat Statistik. Result of examination show that potention of market retribution in examination period 2004-2008 every year get to step on, and projection of market potention that 2009-2014 also every year to step on, appertain efficien and effectiveness, but contribution of market retribution for regional retribution and PAD inclined decrease. Key words: potention of market retribution, projection potention of market retribution, efficiency, effectiveness, and contribution of market retribution regional and to with respect to PAD.

Key word: *potention of market retribution, PAD*

1. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu reformasi dalam segala bidang harus dapat memberi peluang dalam memberikan perubahan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional dengan lebih adil dan seimbang yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yaitu tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan

Keuangan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dimana sistem pemerintah kota atau kabupaten adalah merupakan Daerah Otonomi berdasarkan atas Desentralisasi, sedangkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 1999 (UU No.33 tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemberian otonomi daerah harus lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Di dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

